

KONSEP GERAKAN MORAL MAHASISWA UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA

Jamilah
(Dosen STKIP Garut)

Abstrak

Perjuangan gerakan moral mahasiswa menciptakan sejarah tersendiri dalam ketatanegaraan Indonesia, dimulai dari era 1970 an, 1980 an, 1990 an, dimana pada tahun 1998 merupakan puncak terhadap pelengseran Soeharto, sehingga terjadi perubahan rezim dari orde baru menjadi reformasi. Pemikiran baru terhadap konsep gerakan moral mahasiswa adalah gerakan multi disipliner (Andrianto:2004), artinya bahwa kondisi realitas kebangsaan sedang mengarah kepada perbaikan-perbaikan sistem di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, ketahanan. Gerakan mahasiswa harus berkomunikasi dengan cita-cita besar ini dan melakukan negoisasi terhadap semua lini, baik kalangan atas, maupun bawah.

*Strategi gerakan tersebut selaras dengan kacamata idealis gerakan mahasiswa, yakni gerakan mahasiswa mempunyai dua peran besar. **Pertama**, sebagai the agent of social control. **Kedua**, sebagai the agent of social change. Gerakan mahasiswa menjadi progresif, dinamis, refolusioner dan inklusif, jika, **Pertama**, proaktif merespons keadaan dan teguh pendirian. **Kedua**, melakukan dialog transformatif untuk menciptakan masyarakat komunikatif yang demokratis. **Ketiga**, mendorong pada aktivisnya untuk membentuk kapasitas intelektual yang memadai dan berjiwa intelektual organik.*

Gerakan perubahan besar-besaran dalam upaya membangun ketatapemerintahan yang baik merupakan salah satu kajian demokratisasi dalam segala bidang pemerintahan, oleh karena itu perwujudan good governance semestinya dimulai dari pemerintah yang memiliki komitmen dalam upaya perubahan dan demokratisasi.

Kata kunci : Gerakan moral mahasiswa, *good governance*, demokrasi

A. Pendahuluan.

Dalam perjuangan pergerakan moralnya, mahasiswa membawa corak tersendiri dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Titik perjuangan dari beberapa estafet generasi mahasiswa dari angkatan 1970-an, 1980-an sampai 1990 an, dimana pada tahun 1998 merupakan puncak terhadap *pelengseran* Soeharto. Pada masa tersebut kekuatan pergerakan mahasiswa sangat luar biasa sekali. Di samping sejumlah faktor pendukung eksternal, harus diakui, para demonstiran mahasiswa tahun 1998 unggul dalam stamina. Kita tidak cukup hanya memperhitungkan bagaimana mereka masih saja terus bertahan sesudah digebuk, digempur, diculik atau ditembak. Stamina para demonstiran digempur juga oleh berputarnya waktu, kelelahan, kejenuhan, kebosanan, atau apatisme biarpun sepak terjang mereka sepenuhnya dibiarkan aparat keamanan. Entah apa yang terjadi pada gerakan mahasiswa Indonesia jika Presiden Soeharto mundur bukan bulan Mei, tetapi bulan Juni atau

sesudahnya (Heryanto:2000:306). Pada kenyataannya bahwa pada era 1980-an pergerakan moral mahasiswa sudah mulai memuncak. Aspinal (Australian Nasional University,2000) dalam Gunawan dkk (2009:23) mengemukakan bahwa sejak akhir tahun 1980-an telah tercipta kesadaran radikal dalam gerakan mahasiswa. Radikalisme itu dipengaruhi berbagai bacaan kiri yang mereka baca dalam kelompok studi dan juga dipengaruhi oleh gerakan mahasiswa kiri Filipina dan Korea Selatan. Berbagai kelompok radikal mahasiswa lalu mulai bergerak ke arah kiri, terutama para aktivis mahasiswa di Yogyakarta, Jakarta dan Bandung sebagaimana ditunjukkan dengan pengorganisasian kelas pekerja, mendiskusikan formasi sosial masyarakat Indonesia dan menolak model ala Barat.

Pada masa pemerintahan Habibi, resistensi mahasiswa masih berada dalam gelombang pasang. Meskipun begitu, skala keterlibatannya dalam aksi-aksi telah menyusut secara signifikan. Peran mahasiswa dalam aksi-aksi massa jalanan tidak sama lagi seintens pada saat penggulingan Soeharto yang melibatkan seluruh eksponen mahasiswa di Indonesia. Yang tersisa kemudian hanyalah sebagian kecil mahasiswa yang tersebar di sejumlah kota di mana Jakarta paling dominan (Manan:2005:179).

B. Prinsip Gerakan Moral Mahasiswa

Aktivis pergerakan mahasiswa perlu memahami prinsip-prinsip dalam pergerakan mahasiswa (Kusumah:2007:30). Diantaranya:

1. Menjadikan ideology (*aqidah*), pemikiran (*fikroh*) dan konsep serta pola gerakan (*minhaj haraki*) sebagai pengarah dan sumber petunjuk.
2. Membingkai kerja dengan perilaku (*suluk*) dan etika (*akhlak*) yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan.
3. Memegang teguh konsep perjuangan: member teladan sebelum mengajak, menggembirakan bukan menakuti, mempermudah bukan mempersulit, serta member solusi bukan menghakimi.
4. Melakukan aktivitas pergerakan yang intelektual dan inklusif, serta menjauhi kerja yang anarkis, eksklusif dan khusus untuk golongan tertentu.
5. Mengelola lembaga pergerakan mahasiswa dengan mengacu kepada prinsip legal, formal dan wajar.
6. Mengingat hakikat dirinya sebagai aktivis pergerakan yang memiliki tugas mengajak orang untuk terlibat dalam proses kaderisasi gerakan melalui berbagai potensi yang dimiliki.
7. Menyemangati diri dan aktivis yang lain untuk terus berkontribusi dalam situasi dan kondisi bagaimanapun.
8. Melakukan upaya yang terus menerus untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, penemuan ilmiah dan pemikiran solutif.
9. Memperhatikan secara khusus orang-orang yang cerdas, berprestasi dan kreatif untuk diajak sinergi dalam pergerakan.
10. Menyadari sepenuhnya bahwa kedudukan seorang sivitas akademika lulusan Perguruan Tinggi di hadapan masyarakat adalah berdasar pada kompetisi ilmu, keterampilan, moral

dan interaksi sosialnya. Karenanya tidak ada keringanan dan pengecualian dalam pencapaian hal tersebut.

11. Mengantisipasi kondisi dan kebutuhan dunia pasca kampus.
12. Memiliki peran besar dalam isu kemanusiaan, kebangsaan dan keumatan
13. Membela hak asasi manusia, kemerdekaan dan keadilan bagi manusia, bangsa dan umat.
14. Melakukan interaksi dan hubungan baik dengan semua golongan dalam batas adab umum yang berlaku dan prinsip persaudaraan serta kemanusiaan yang luas.
15. Memahami dan memanfaatkan logika dan adab umum sivitas akademika serta peraturan formal keorganisasian sivitas akademika yang berlaku.
16. Memandang penting keikutsertaan dalam media mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan.

Gerakan moral mahasiswa merupakan bentuk gerakan atau aksi kolektif mahasiswa, dimana gerakan ini merupakan bentuk dari gerakan sosial. Menurut Hamka (2000) dalam Matulesy (2005:46) ciri khas dari gerakan moral mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Gerakan mahasiswa diwadahi oleh organisasi, baik yang bersifat permanen untuk kepentingan jangka panjang maupun gerakan temporer (*anomic*) dalam jangka pendek.
- b. Setiap gerakan mahasiswa memiliki tujuan yang berbeda-beda menurut keragaman organisasi. Pada gerakan mahasiswa yang permanen, tujuannya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan pada gerakan mahasiswa yang temporer bertujuan menekan kebijakan pemerintah dan melakukan perubahan politik.
- c. Gerakan mahasiswa dilakukan dengan penuh kesadaran bukan semata-mata atas dasar ketidakpuasan dan emosi yang membabi buta. Jadi gerakan mahasiswa didasarkan pada adanya idealism, kepekaan, sikap kritis dan sikap anti kemapanan.
- d. Setiap gerakan mahasiswa memiliki ideologis yang bervariasi menurut organisasi dan semangat jaman. Sebagai contoh, HMI dengan ideology Islam, GMNI dengan ideology nasionalisme, KAMMI dengan ideology radikalisme, SMID dan PIJAR dengan ideology populisme kiri dengan membela kaum buruh dan tani.
- e. Gerakan mahasiswa tidak membentuk lembaga resmi seperti partai politik, namun lebih menekankan aksi-aksi kolektif yang inkonvensional untuk mewujudkan tujuan gerakan. Sarana mobilisasi aksi massa berupa organisasi temporer seperti kesatuan aksi/komite dan solidaritas ad-hoc untuk menggelar parlemen jalanan.
- f. Di dalam menggelar aksi kolektif, gerakan mahasiswa menampilkan isu-isu-isu strategis sebagai sarana untuk memobilisasi massa dan mengefektifkan aksi.

C. Konsep Gerakan Moral Mahasiswa

Pemikiran baru terhadap konsep gerakan mahasiswa diutarakan oleh Andrianto (2004), beliau mengemukakan tentang Gerakan Multi Disipliner. Jika diterjemahkan dengan konteks kekinian di mana kondisi realitas kebangsaan sedang mengarah kepada perbaikan-perbaikan sistem di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, ketahanan. Gerakan mahasiswa harus “berkomunikasi” dengan cita-cita besar ini dan melakukan negoisasi terhadap semua lini, baik kalangan atas maupun bawah. Strategi gerakan ini selaras dengan kacamata idealitas Gerakan Mahasiswa, yakni gerakan mahasiswa mempunyai dua peran besar. Pertama, sebagai *the agent of social control* . kedua, sebagai *the agent of social*

change. Sederhananya bahwa konsep gerakan mahasiswa multidisipliner sedikit merubah paradigm tentang posisinya terhadap keberadaan pemerintah. Pilihan gerakan baru ini merupakan refleksi panjang kaum aktivis. Diaakui atau tidak, ada harapan dari Gerakan Mahasiswa agar pemerintah dapat menjadi mitra gerakan mahasiswa gerakan yang sebelumnya mengalami kebuntuan. Namun perlu difahami pula, kerjasama disini tidak dimaksudkan Gerakan Mahasiswa harus tunduk pada penguasa.

Ada pendapat lain tentang konsep gerakan moral mahasiswa ini, konsep sebagai agen perubahan dan konsep sebagai control social ternyata harus diperbaharui lagi, mengingat kondisinya sudah berbeda dengan perjuangan terdahulu. Konsep reposisi (menata ulang kembali) gerakan mahasiswa sebagai *agent of change* tidak dipandang sebelah mata.

Dachroni (2009) mengemukakan tiga tren gerakan yang patut menjadi perhatian gerakan mahasiswa kekinian. **Pertama**, tren/model gerakan intelektualitas. Sebagai kaum yang memiliki kecerdasan dan ketajaman menganalisa suatu persoalan sudah saatnya kiblat pergerakan mahasiswa saat ini berbasis riset dan kajian-kajian ilmiah, karena salah satu wujud dari tridharma perguruan tinggi adalah pendidikan dan penelitian. **Kedua**, tren/model gerakan jamaah atau pengkaderan. Bukan sebuah gerakan kalau tidak mampu melakukan proses pengkaderan, sebab untuk melakukan suatu perubahan diperlukan kerja-kerja berjamaah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS As-Shaff ayat 4, “sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”. **Ketiga**, adalah tren atau model gerakan mahasiswa kewirausahaan. Tak bisa dipungkiri, cukup banyak aktivis dan gerakan mahasiswa yang mengorbankan bahkan menjual idealismenya karena mengalami penyakit kanker (kantong kering). Sudah saatnya, dengan kedua modal di atas gerakan mahasiswa harus memikirkan kondisi finansialnya dengan model pemberdayaan wirausaha.

Dalam tulisan lain Dachroni (2012) mengemukakan tentang konsep gerakan mahasiswa yang dilandasi oleh kebersamaan, hal ini merupakan suatu keharusan bagi gerakan mahasiswa untuk membangun sebuah kebersamaan gerakan, khususnya dalam menyikapi isu-isu public yang strategis dan menindas masyarakat lemah.

Menurutnya, ada tiga tantangan besar ketika kita membicarakan masalah membangun kebersamaan gerakan mahasiswa yang saat ini terkesan bergerak sendiri-sendiri. **Pertama**, perbedaan persepsi (pandangan). Cara pandang gerakan mahasiswa yang relative berbeda dalam menyikapi suatu persoalan. **Kedua**, motif kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan tidak jarang *disusupi* dengan kepentingan politik praktis. **Ketiga**, egoism gerakan dalam merebut isu dan perebutan kekuasaan di kampus.

D. Gerakan Moral Mahasiswa Dan *Good Governance*

Pada dasarnya, gerakan mahasiswa merupakan sebuah gerakan budaya, karena ia memiliki kemandirian dan berdampak politik yang sangat luas. Oleh karena itu, mereka tidaklah boleh cepat puas dengan hasil yang dicapai. Gerakan mereka juga harus senantiasa menegakkan asas kebenaran politik dan pengungkapan kebenaran publik sekaligus. Maka, budaya Indonesia yang cenderung cepat puas dengan keadaan dan tidak peduli dengan perkembangan karena sibuk sendirian, tidaklah patut menjadi paradigma gerakan mahasiswa. (Anwa:1981).

Meskipun pemerintah, para politisi, anggota DPR, ataupun para eksekutif dan penguasa seperti tampak kita saksikan sehari-hari kurang berbudaya adiluhung, namun mahasiswa sebagai harapan bangsa terbesar tidaklah perlu terhinggapi virus tersebut. Terlebih lagi, budaya *patron-client*, malu, sungkan dengan senior, dan bermuka dua (munafik) yang banyak menjangkiti politisi dan sebagian masyarakat itu, bukanlah contoh yang bagus bagi para aktivis gerakan mahasiswa.

Agar gerakan mahasiswa menjadi progresif, dinamis, revolusioner, dan inklusif, gerakan mahasiswa haruslah meniscayakan hal berikut ini:

Pertama, pro-aktif merespons keadaan dan teguh pendirian. Gerakan mahasiswa haruslah bersatu dalam visi penegakan keadilan dan penumpasan kemunafikan. Hal ini bisa dilakukan dengan saling memasok informasi untuk selanjutnya dilanjutkan pada penyusunan agenda aksi. Sedangkan teguh pendirian yang dimaksud di sini adalah gerakan mahasiswa haruslah bersifat independen dan tidak menjadi perpanjangan tangan para seniornya. Karena, hal ini biasanya hanya akan menimbulkan friksi di kalangan sendiri dan saling memperebutkan proyek demonstrasi.

Kedua, melakukan dialog transformatif-meminjam istilah Jurgen Habermas-untuk menciptakan masyarakat komunikatif yang demokratis. Bila selama ini gerakan intelektual cenderung elitis dan menggunakan bahasa yang mengawang, maka gerakan mahasiswa yang juga gerakan intelektual plus, haruslah mencerdaskan, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat yang selama ini banyak ditindas.

Ketiga, mendorong para aktivisnya untuk membentuk kapasitas intelektual yang memadai dan berjiwa intelektual organik-meminjam istilah Antonio Gramsci.

Hal ini berguna agar para aktivis gerakan tidak hanya sibuk di lapangan, kurang melakukan refleksi, dan cenderung bergerak secara pragmatis. Bila mereka mampu memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, tentu saja akan berguna pada penyusunan strategi dan pengajuan alternatif konsep penyelesaian masalah yang dikritik secara lebih sistematis dan memadai.

Pada dasarnya mahasiswa sebagai salah satu agen perubahan (*agent of change*), di mana masyarakat menganggap mahasiswa merupakan sosok salah satu kelompok sosial yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dan ketercerahan yang akan membawa perubahan sejarah menjadi lebih baik di masa mendatang (Hikam, 1999:221). Sebagai salah satu komponen sosial, maka mahasiswa bagaimanapun tidak pernah lepas dari kaitan-kaitan dialektis dengan struktur yang ada, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Mereka sebagai pelaku (*actor, agent*) sosial harus melakukan respon terhadap perubahan yang terjadi, tetapi pada saat yang sama respons tersebut harus dibatasi oleh latar kesejarahan dan struktur yang ada.

Sebagai *actor social* mahasiswa dituntut memiliki kemampuan tertentu dan secara historis ikut membentuk (*shaping*) proses politik bangsa kita. Namun kemampuan tersebut semakin lama semakin berkurang menyusul terjadinya proses perubahan besar di dalam struktur politik yang dicanangkan serta dilakukan oleh orde baru dalam rangka menopang proses modernisasi dan pembangunan ekonomi.

Demonstrasi atau gerakan mahasiswa pada dasarnya merupakan bentuk pemberontakan dalam menuntut keadilan hukum (Heryanto, 2000:279). Era dimulainya reformasi ditandai dengan gerakan mahasiswa yang terjadi di seluruh penjuru dunia, sehingga meruntuhkan kekuatan orde baru sebagai penguasa yang telah menjalankan roda pemerintahan tidak sesuai dengan kehendak dan harapan bangsa Indonesia. Maraknya aksi mahasiswa merupakan salah satu bentuk penyaluran aspirasi tuntutan mereka terhadap perubahan system Negara yang dinilai tidak sesuai dengan harapan bangsa ini.

Kehadiran-kehadiran kekuatan-kekuatan penekan yang terorganisir dan relative mandiri dari kontrol Negara yang merupakan bagian dari *civil society*, sebagai salah satu syarat utama proses dan konsolidasi demokrasi. Menurut Fortuna (2009:XVIII) kehadiran kelompok kelas menengah dan *civil society* yang mengusung ide-ide perubahan turut mendorong runtuhnya rezim orde baru dan dihidupkannya kembali idealism demokrasi di Indonesia yang memungkinkannya partisipasi politik secara luas melalui system pemilihan kompetitif dan transparan yang diharapkan dapat menghasilkan wakil rakyat dan

pemerintahan yang aspiratif, baik dan bersih serta akuntabel didedikasikan untuk kepentingan bersama.

Menurut Hikam (1999:227) ada 3 macam respon dalam gerakan mahasiswa, yaitu: pertama, mahasiswa yang menceburkan diri sepenuhnya dalam hiruk pikuk proses modernisasi, mereka adalah mahasiswa yang berwawasan pragmatic dan mengikuti hukum *supply and demand* dengan tujuan mengisi keperluan pasaran kerja meniti karir yang diinginkannya. Respon kedua, mereka yang memilih berpegang pada idealism mahasiswa sebagai kekuatan sosial yang harus mewarnai gerak masyarakat, terutama dalam politik. Umumnya mereka sangat militant dalam menyuarakan aspirasi dan cenderung menjadi radikal. Respon ketiga, mereka yang mencoba melakukan kritik terhadap kondisi yang ada baik dalam lingkup perguruan tinggi maupun makro dan mencari *alternative transformative*, dalam hal ini bagaimana mahasiswa menempatkan diri dalam proses trasformasi social akibat modernisasi serta menjadi salah satu ujung tombak bagi pemberdayaan masyarakat terutama di kalangan bawah yang menjadi korban proses itu.

Dalam kaitan dengan perubahan demokrasi dalam perwujudan ketatapemerintahan yang baik, kualitas demokrasi bagi mahasiswa adalah bagaimana pemerintah dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pemilih serta merespon kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam konteks pemerintahan (*governance*), dalam kajian isi bagaimana demokrasi menempatkan masyarakat memiliki kesetaraan dalam politik dan sejauhmana secara prosedural masyarakat terlibat secara partisipatif, kompetitif dan akuntabilitatif.

Manurut Prasajo (2009:5) prinsip dasar demokrasi dalam mewujudkan *good governance* adalah 1) kontrol masyarakat terhadap keputusan publik dan pembuat keputusan publik, 2) kesetaraan masyarakat dalam relasinya terhadap keputusan public, dua prinsip ini merupakan prinsip dasar *good governance* yaitu partisipasi, representasi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan solidaritas.

Gerakan perubahan besar-besaran dalam upaya membangun pemerintahan yang baik merupakan salah satu kajian demokratisasi dalam segala bidang pemerintahan. Oleh karena itu perwujudan *good governance* semestinya dimulai dari pemerintah dengan sumber daya yang ada memiliki komitmen yang lebih dalam upaya perubahan dan demokratisasi, demokratisasi ini dmullai dengan keinginan untuk mendengarkan suara public (*resfonsivitas*) dan transparansi dan tanggung jawab (akuntabilitas). Menurut Denhardt, 2003 (Indiahono, 2009:8) menjelaskan bahwa pemerintah di manapun harus lebih berpihak pada public.

Pemerintahan yang baik model apapun harus mengutamakan *public interest* dan *public affairs*.

Secara teoritis *good governance* mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijakan secara transparan serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kekuasaan didasarkan pada kelembagaan bukan perseorangan atau kelompok tertentu. Kekuasaan juga harus taat kepada prinsip bahwa semua warga Negara memiliki hak dan kewajiban sama di mata hukum (Kaloh, 2009:172).

Gerakan masyarakat muncul diakibatkan oleh karena pemerintah tidak mampu mengelola pemerintahan secara baik. Oleh karena itu tantangan ke depan pemerintah, termasuk pemerintah daerah adalah bagaimana menciptakan pengelolaan pemerintahan yang melayani masyarakat (*good governance*). Asumsinya, jika masyarakat merasa pengelolaan secara baik dan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka pemerintahan dianggapnya sebagai suatu rahmat/anugerah.

Era dimulainya gerakan reformasi mahasiswa atau istilahnya gerakan moral mahasiswa puncaknya terhadai pada 1998 pada saat krisis ekonomi melanda negeri ini. Di tengah kelumpuhan pemerintah dan krisis ekonomi lah pelbagai gerakan delegitimasi orba bermunculan. Mahasiswa merupakan kekuatan garda terdepan (*avant garde*) yang memelopori gerakan ini secara konfrontatif. Mereka sangat gencar dan tegar menggiatkan aksi-aksi perlawanan massa terhadap kekuasaan orba. Menurut Ken Young, gerakan mahasiswa sangat berhasil mengorganisasi diri, pintar mengeola isu, dan angkas berpolitik.

Semula gerakan mahasiswa adalah bentuk aksi keperihatinan terhadap krisis ekonomi yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Aksi itu mula-mula hanya dikuti oleh segelintir mahasiswa dan lebih sering dilakukan di dalam kampus. namun efek bola salju gerakan it uterus meluas dan berkembang menjadi gerakan mahasiswa se-Indonesia dengan isu pokok suksesi kepemimpinan nasional dan reformasi total. aksi-aksi mereka disambut liputan luas dan simpatik oleh pers, dan menjadi magnet banggunya solidaritas mahasiswa secara luas.

Tatkala siding MPR pada tanggal 11 Maret 1998 memilih kembali Suharto sebagai Presiden ke 7 kalinya, aksi-aksi mahasiswa justru semakin menggila. Pemilihan kembali Suharto sebagai Presiden rupanya dianggap sebagai pelecehan terhadap perjuangan mereka. Militansi mahasiswa semakin menghebat ketika anak Suharto dan kroninya masuk dalam susunan Kabinet Pembangunan VII yang diumumkan tanggal 14 Maret 1998 di Istana Merdeka. Ini semakin membuktikan bahwa tuntutan KKN yang mereka suarakan tidak pernah di gubris.

Meski telah dilakukan dialog, mahasiswa tetap menilai tidak efektif, tuntutan mereka sudah jelas yakni reformasi total dan mesti dimulai dengan lengsernya Suharto. Aksi-aksi keprihatinan dan mimbar bebas masih terus berlanjut dipelbagai kota seiring terus berlanjutnya bentrok mereka dengan aparat. di tangan gemuruh aksi-aksi itu, masyarakat digemparkan dengan berita penculikan para aktivias demokrasi oleh aparat militer. sebagai korban bisa ditemukan dan sebagian lagi menuturkan penderitaanya. Hal ini yang semakin memojokkan posisi Suharto dan militer.

Aksi yang semakin memanas itu tidak semakin surut, pada saat 4 mahasiswa Unsakti tewas tertembak oleh aparat di kampusnya tanggal 12 Mei 1998. Tragedi ini menimbulkan rasa simpati dan duka yang mendalam sekaligus membakar rasa geram dan marah dari masyarakat luas. Kegeraman dan kemarahan masyarakat dan mahasiswa itu diikuti dan diperburuknya melonjaknya harga-harga sehingga tak terelakkan terjadilah “kerusuhan Mei” pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta. Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa tercatat berperan besar sebagai *creative minority*, meminjam istilah Arnold Toynbee, di mana mereka selalu menjadi motor penggerak perubahan di Indonesia. Peran itu kembali terbukti dalam peristiwa tumbangnya Suharto dan menaklukkan Orba. Prestasi tersebut semakin mengukuhkan kebenaran predikat mahasiswa sebagai *Agent of Change*.

D. Penutup

Jatuhnya Suharto bukanlah tujuan akhir perjuangan mahasiswa, tapi karena Suharto berarti sebuah perintang utama mencapai perubahan telah disingkirkan. Gerakan mahasiswa sejak era transisi terus berlanjut, kendati dengan gelombang pasang surut. Pada masa Habibie, resistensi mahasiswa masih berada dalam gelombang pasang. Meskipun begitu skala keterlibatannya dalam aksi-aksi telah menyusut secara signifikan. Peran mahasiswa dalam aksi-aksi jalanan tidak sama lagi seintens pada saat penggulingan Suharto yang melibatkan seluruh eksponen mahasiswa di Indonesia. yang tersisa kemudian hanyalah sebagian kecil mahasiswa, yang tersebar di sejumlah kota di mana Jakarta paling dominan.

Saat ini kita saksikan bahwa geliat semangat perjuangan mahasiswa pada era transisi menyurut padam. Kecuali itu, sesaat setelah Suharto jatuh gerakan mahasiswa mengalami disorientasi, fragmentasi dan menyusutnya militansi. Disorientasi terjadi terutama disebabkan oleh raibnya *common enemy* (yaitu figur Suharto) yang sebelum mempersatukan mereka. Setelah Suharto runtuh gerakan mahasiswa kehilangan isu sentral untuk menjaga jalinan kebersamaan yang sudah terbangun.

Disorientasi juga terjadi manakala kelompok-kelompok mahasiswa di daerah mulai meninggalkan isu-isu nasional dan mengangkat isu-isu lokal. Mereka mengelak dari isu-isu seperti tolak Habibie dan hasil SI MPR karena menurut mereka reformasi tidak terbatas pada persoalan di tingkat nasional, tetapi juga persoalan daerah. Sikap ini juga disebabkan karena mereka tidak mau terperangkap sebagai komoditi elite politik, karena itu artinya mahasiswa telah mencederai kemurnian gerakan mereka. Dari cara pandang inilah bermunculan isu-isu local yang disuarakan mahasiswa, mulai dari gugatan atas pejabat dan mantan pejabat yang melakukan KKN hingga persoalan Kampus (akademik).

Situasi di atas menunjukkan bahwa kohesifitas gerakan mahasiswa dalam agenda reformasi lebih bersifat taktis dan tentative. Mereka bersatu lantaran ada momen dan musuh bersama, daripada perhitungan strategis dan permanen berdasar visi jangka panjang dan ditopang struktur serta jaringan yang kuat. Ketika momen dan musuh bersama itu raib, gerakan inipun gamang merespon situasi, terbalik ke watak aslinya, yakni sulit diajak bersatu dan mudah berselisih paham. Kondisi ini, justru melemahkan kondisinya sendiri yang member ruang leluasa bagi status quo memperkuat diri.

Gerakan mahasiswa yang bersifat fragmentasi memang tidaklah mengejutkan, sebab gerakan mahasiswa memang bukan gerakan yang kohesif dan solid. Gerakan mahasiswa tidak berdiri diatas pondasi yang homogen, sehingga rentan oleh bibit-bibit fragmentasi diantara mereka. perbedaan latar belakang motivasi, cara pandang dan termasuk juga afiliasi organisasi, membuat gerakan mahasiswa mudah terseret arus konflik dan friksi. Keadaan ini adalah factor menurunnya kekuatan gerakan mahasiswa dan akhirnya tak mampu membangun kekuatan yang memadai untuk menghadapi Negara.

Massa mahasiswa cair bukanlah bagian inti dari gerakan mahasiswa yang menjadi motor penggerak aksi-aksi gerakan mahasiswa. Keterlibatan masa mahasiswa cair pada umumnya lebih didorong oleh sikap solidaritas saja. Mereka lebih sebagai kumpulan individu yang iktu meramaikan dan memeriahkan gerakan aksi mahasiswa. Karena itu turunnya Suharto banyak diartikan sebagai selesainya perjuangan reformasi. Namun selain ini, tampaknya di kalangan masa cair ini telah jenuh dengan aksi-aksi massa seolah-olah tidak selesai-selesai. Dalam keadaan demikian, intensitas aksi-aksi mahasiswa mengalami kemandegan, meskipun tidak senyap sama sekali.

Persoalan-persoalan internal dan eksternal gerakan mahasiswa tersebut tentu menguntungkan posisi Negara. Negara lantas memandang gerakan mahasiswa bukan sebagai kekuatan yang mengancam. inilah penjelasannya mengapa negara tidak ragu-ragu melakukan represif terhadap aksi-aksi mahasiswa yang mengusik agenda dan kepentingan rezim yang

berkuasa. Tetapi meskipun saat ini aksi gerakan mahasiswa telah menyusut pamornya dan keampuannya untuk mendesak tuntutan, mereka berhasil menciptakan ketegangan dengan negara sehingga kalau negara tidak terlalu menghitung kekuatan mahasiswa paling sedikit mereka bisa membentuk opini publik dan membuat negara tahu apa yang mereka kehendaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Rudi dkk (2009), *Menyulut Lahan Kering Perlawanan Gerakan Mahasiswa 1990 an*, Jakarta, Jagakarsa
- Kusumah, Indra (2007) *Risalah Gerakan Mahasiswa*, Bandung, Indidec Press
- Heryanto, A (2000) *Perlawanan Dalam Kepatuhan*, Jakarta, Mizan
- Mannan, M (2005) *Gerakan Rakyat Melawan Elite*, Magelang, Langit Aksara
- Matulesy, A (2005) *Mahasiswa dan Gerakan Sosial*, Jogjakarta, Srikandi
- Hikam, AS (1999) *Politik Kewarganegaraan (Landasan redemokratisasi di Indonesia)*, Jakarta, Erlangga.
- Indiahono, D (2009), *Telaah Kebijakan Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah*, Jogjakarta, Gaya Media
- Kaloh, J (2009), *Kepemimpinan Kepala daerah*, Jakarta, sinar Grafika
- Prasojo, E (2009), *Reformasi Kedua*, Jakarta, Salemba Humanika